

SEDANG JADI SOROTAN
TNI Jangan Terpancing



KR-Istimewa

Danrem 072/Pamungkas Brigjen TNI Zainul Bahar SH MSi memberi pengarahan.

YOGYA (KR) - Situasi beberapa minggu terakhir ini Tentara Nasuional Indonesia (TNI) menjadi sorotan. Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) memberikan beberapa arahan dan perintah kepada Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto SE MSi dalam menyikapi perkembangan situasi dalam masa-masa Pemilu.

“Perintah dari Presiden RI kepada Panglima TNI, agar kita (TNI) jangan sampai terpancing dengan situasi yang berkembang saat ini. Kita harus menahan diri dan berlapang dada,” ucap Danrem 072/Pamungkas Brigjen TNI Zainul Bahar SH MSi saat kunjungan kerja ke Kodim 0734/Kota Yogyakarta Jalan AM Sangaji No.55, Jetis, Yogya, Kamis (11/1).

Danrem juga menyampaikan bahwa TNI harus bersikap netral tidak terlibat dalam politik praktis sesuai UU TNI setiap prajurit tidak boleh berpolitik. “Jangan sampai terlibat atau mendukung kegiatan partai politik,” tegas Danrem yang didampingi Ketua Persit KCK Koorcab Rem 072 PD IV/Diponegoro Ny. Kemala Zainul Bahar. **(Vin)-d**

GANTIKAN SUGENG MUHARI
Tutik Husniati Kepala MTsN 3 Bantul

BANTUL (KR)-Tutik Husniati SAg MSI resmi menggantikan Sugeng Muhari†SPdSi MPd sebagai Kepala MTsN 3 Bantul. Serah terima jabatan dilakukan dalam seremonial yang digelar di ruang baca perpustakaan MTsN 3 Bantul, Jumat (12/1), disaksikan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bantul H Ahmad Sidqi MEng, Pengawas Madrasah Drs Miftakhul Bakhri MPd dan KH Ahmad Zabidi.

Tampak hadir unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kapanewon (Forkopinkap) Imogiri, Pimpinan Pondok Pesantren, Pengurus Panti wilayah Wukirsari, para Kepala Sekolah yang tergabung dalam Polja 12 Imogiri, perwakilan MTsN 7 Bantul dan keluarga besar MTsN 3 Bantul. Sebelum menjadi Kepala MTsN 3 Bantul yang baru, Tutik Husniati menjabat Kepala MTsN 7 Bantul. Sedangkan Sugeng Muhari selanjutnya mengampu jabatan baru sebagai Kepala MTsN 4 Bantul. Dalam kesempatan ter-

sebut, Kakan Kemenag menyampaikan, dalam lembaga madrasah sinergitas stake holder perlu dibangun. Jika itu terbangun maka perkembangan madrasah akan mudah dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal dibutuhkan kekom-pakan dan kerja sama antara Kepala Madrasah, Kepala TU dan juga dengan bendahara. Sinergitas dengan luar madrasah misalnya dengan pondok pesantren dan panti asuhan. Sejauh ini sudah terjalin kerja sama yang baik, sehingga menjadi tugas Ke-



KR-Istimewa

Tutik Husniati bersama Kakankemenag Bantul dan tamu undangan.

pala Madrasah yang baru untuk bisa mempertahankan dan meningkatkan.

“Jadikan madrasah sebagai destinasi pendidikan bagi masyarakat dengan menjalin komunikasi dan promosi menggunakan keunggulan madrasah. Madrasah yang menghasilkan prestasi secara otomatis akan muncul bakat siswa dan menjadi daya tarik dari luar,” pesan Kakan-kemenag.

Sugeng Muhari mengucapkan terima kasih

kepada semua pihak yang telah mendukung tugasnya sebagai Kepala Madrasah dalam kurun waktu empat tahun. Dirinya berharap penggantian untuk dapat melanjutkan prestasi yang telah diraih. Ke depan ada tugas besar yang mesti diselesaikan, yakni pembangunan musala dan mempersiapkan akreditasi.

Tutik Husniati meminta kepada keluarga besar MTsN 3 Bantul untuk dapat menerima kehadiran-

nya sebagai pimpinan yang baru. Tak lupa Tutik memkenalkan suaminya, Dr Habib SAg MAg (Dosen Prodi Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogya) dan tiga putrinya. Suasana semakin haru dengan persembahan puisi oleh siswa yang diwakili Nur Aina Salwa dengan judul ‘Ungkapan Nurani untuk Pak Sugeng Muhari’ karya guru Seni Budaya, Sutanto. **(Rar)-d**

HUT KE-16 BPRS HIK-MCI
Berkomitmen Percepat Digitalisasi

YOGYA (KR) - Guna mendukung perkembangan BPRS Harta Insan Karimah-Mitra Cahaya Indonesia (HIK MCI) yang semakin pesat dan digitalisasi perbankan semakin tidak terelakkan, BPRS HIK-MCI semakin mempercepat proses digitalisasi dalam manajemen dan layanannya. Dengan demikian dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan cepat, tepat, dan aman.

“Sebagai BPRS terbesar di DIY, dengan nilai aset mendekati Rp 300 miliar, digitalisasi merupakan suatu keniscayaan,” kata Direktur Utama BPRS HIK MCI Yogyakarta,



KR-Istimewa

Edy Suandi Hamid bersama pimpinan BPRS HIK-MCI.

Kholid SPd MM pada acara Fun Walk yang diadakan untuk menyemarakkan HUT ke-16 bank tersebut, di Yogyakarta, Sabtu (13/1).

Kegiatan ulang tahun

yang diadakan di kantor Jalan Kaliurang Km 9. Diikuti 200 peserta, baik dari internal maupun mitra kerja dari Lembaga pendidikan, UMKM dan masyarakat setempat. Di

samping fun walk, dialokasikan juga santunan untuk 30 anak yatim, serta bantuan sembako untuk Yayasan Rumah Yatim.

Komisaris BPRS HIK MCI sekaligus salah satu pemegang saham Prof Dr Edy Suandi Hamid menegaskan, tidak mudah untuk menempati posisi terbesar di DIY. Semua bisa dicapai karena tata kelola dan kinerja yang baik. Tentunya dengan mendapat dukungan dari banyak mitra kerja, serta pengawasan yang ketat. Sebagai BPRS selalu menjaga agar sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan syariah. **(Ria)-d**

LEMBAGA PENDIDIKAN MANCA NEGARA
Tertarik Pelajari Keistimewaan DIY

YOGYA (KR) - Keistimewaan yang dimiliki DIY menjadi daya tarik tersendiri bagi lembaga pendidikan tinggi dari beberapa negara, salah satunya Malaysia. Sekitar 18 mahasiswa Universiti Malaya berkunjung ke Pemda DIY Jumat (12/1).

Mereka diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Beny Suharsono, didampingi Asisten Sekretaris Daerah DIY Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Drs Tri Saktiyana, MSI, Kepala Biro Tata Pemerintahan Pemda DIY, Kanjeng Pangeran Haryo Yudanegara, serta Kepala Bagian Pelayanan dan Umum Paniradya Keistimewan DIY, Arianti Luhur Tri Setyarini, SH.

“DIY merupakan daerah yang memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki daerah lain. Berbeda sekali dengan Negara Malaysia yang pemerintahannya adalah Kerajaan. Kunjungan ini merupakan sebuah implementasi ilmu yang dipelajari pada Universiti Malaya tentang Politik Islam,”

kata pimpinan Universiti Malaya, Dr Osman bin Md Rasyid di Gedhung Pracimosono Kompleks Kepatihan, Jumat (12/1).

Dalam kesempatan itu Beny Suharsono menjelaskan, DIY memiliki lima kekhususan. Meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang. Kedua soal pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Ketiga, kelembagaan Pemda DIY. Keempat kebudayaan, pertanian dan tata ruang, serta yang kelima pertanian.

“Di Indonesia, khususnya Yogyakarta memiliki dua otonomi, satu tingkat kabupaten atau kota yang kedua di tingkat provinsi,” ujarnya.

Kepala Biro tata Pemerintahan Setda DIY, KPH Yudanegara menyatakan, Yogyakarta memiliki keistimewaan, yaitu pada tingkat desa, setelah dipilih oleh masyarakat kemudian dilantik oleh bupati, kepala desa langsung ditetapkan sebagai pemangku keistimewaan. Para kepala desa bertanggung jawab menjaga empat dari lima urusan. **(Ria)-d**

DISELENGGARAKAN UWM-NIU

Diskusi ‘Campus Sustainability and Society’



KR-Devid Pernama

Peluncuran program Fast RS PKU Muhammadiyah.

YOGYA (KR) - RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta meluncurkan Fasilitas Antar Obat Sampai Tujuan (Fast) di Poli Vaksin rumah sakit setempat, Jumat (12/1). Program ini untuk semakin meningkatkan pelayanan kepada pasien.

Direktur Utama RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, dr Mohammad Komarudin menuturkan, program layanan ini adalah bentuk komitmen RS PKU Muhammadiyah Yogya un-

tuk semakin optimal dalam melayani masyarakat. Nantinya dalam layanan ini, pasien tidak perlu lagi mengantre obat, tetapi obat akan diantar oleh petugas sampai tujuan/rumah pasien masing-masing.

“Semoga kerja sama ini bisa mendatangkan kebahagiaan bagi kita semua,” kata Komarudin. Layanan Fast ini adalah kerja sama antara RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta dengan PT Pos Indonesia.

Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia (Persero), Tonggo Marbun mengatakan, kerja sama ini adalah bentuk ibadah, “Semoga teman-teman bisa menjaga amanah untuk fasilitas ini, karena ini juga termasuk ibadah,” ucap Marbun.

Komarudin menambahkan, banyak pasien yang memiliki kesibukan, sehingga diharapkan program Fast ini dapat membantu pasien yang akan mengambil obat tetapi terkendala keterbatasan waktu. Fast adalah salah satu bentuk usaha untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat (pasien).

“RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta selalu berinovasi dalam setiap pelayanannya untuk memberikan pelayanan yang terbaik,” tutupnya. **(Dev)-d**

YOGYA (KR) - Dunia pendidikan dituntut terus mengikuti perkembangan teknologi. Demikian diskusi terbatas Universitas Widya Mataram (UWM) dengan Northern Illinois University (NIU) pada Rabu (10/1) lalu di Kampus Terpadu UWM, Banyuraden, Gamping, Sleman.

“Sesuai tema, *Campus Sustainability and Society*, maka kampus harus memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai fasilitas lebih dan serba canggih untuk memperlancar proses pembelajaran,” kata Rektor UWM, Prof Dr. Edy Suandi Hamid, MEc dalam sambutannya

Turut hadir Wakil Rektor (WR), pejabat struktural dan fungsionaris di lingkungan UWM, Dr. Inge Gunawan. Sedang Delegasi NIU terdiri dari President Dr Lisa C Freeman, Vice President and Chief Financial Officer George Middlemist PhD CPA, Dean of Liberal Arts and Sciences Robert Brinkmann, Ph.D., Director of The Center for Southeast Asian Studies Eric Alan Jones PhD dan Catherine Middlemist, CPA.

Hadir pula Dr Tifa Noer Amelia SE

MAcc yang merupakan alumnus postdoc NIU sekaligus dosen Perbanas Institute Jakarta, dan Dr Andi Gazly yang merupakan Postdoc Scholar NIU.

“Terima kasih kesempatan berdiskusi, saat ini dan tantangan universitas di masa depan. Termasuk mahasiswa juga memiliki tantangan tersendiri, serta keberlanjutan yang

mungkin terjadi,” ucap Dr. Liza Freeman

Robert Brinkmann PhD menyampaikan materi membangun kampus, komunitas dan dunia berkelanjutan. Sedangkan Dr Eric Jones menyampaikan upaya menumbuhkan kompetensi budaya, mempersiapkan tenaga kerja global dan memperluas cakrawala intelektual. **(Vin)-d**



KR-Istimewa

Foto bersama jajaran UWM dan NIU usai diskusi.



Dr. Junaidi, S.Ag., M.Hum., M.Kom
Dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta

KONDISI perpolitikan di Indonesia sekarang tidak sedang baik-baik saja dan mengalami sindrom kekacauan serta kemunduran dalam demokrasi. Menurut penulis harus segera diadakan evaluasi dan perbaikan dalam berbagai perspektif.

Teori Al-Ghazali dalam Perpolitikan di Indonesia

Indonesia bisa belajar dari negara-negara yang pernah jatuh namun bisa bangkit dari keterpurukan. Para pemimpin dan penguasa bisa mempraktekkan teori-teori politik dari para tokoh-tokoh yang menguasai tentang perpolitikan. Pertanyaannya adalah apakah teori politik al-Ghazali sebagaimana judul tulisan ini bisa dan relevan diterapkan dalam perpolitikan Indonesia?

Teori politik al-Ghazali dalam kitab al-Tibr al Masbuk fi Nashihat al Muluk merupakan salah satu karya fundamentalnya tentang politik berisi tentang nasehat untuk penguasa dihadiahkan kepada Sultan Muhammad Ibnu Malik dari Dinasti Saljuk. Bagi al-Ghazali seorang khalifah (pemimpin) adalah pelindung pelaksanaan syariat (hukum). Setidaknya pelaksanaan hukum merupakan

tanggung jawab penguasa. Maka menurutnya keberadaan negara sangat urgen dan utama serta vital. Bagi Ibn Taimiyah keteraturan agama tidak bisa dihasilkan kecuali dengan seorang imam (pemimpin negara) yang ditaati. Oleh karena itu menurut al-Ghazali seorang pemimpin beserta perangkat-perangkat politiknya harus menjalankan tugas sesuai dengan adab dan etika berpolitik yang sehat.

Jika seorang pemimpin yang menjaga adab berpolitik, maka politik menjadi tugas mulia dan terhormat. Jika penguasa dan pejabat negara zalim, maka harus dijauhi. Menurut al-Ghazali ada beberapa kriteria yang harus dimiliki seorang pemimpin diantaranya. Pemimpin harus memiliki keimanan yang benar, aqidah yang kuat dan seorang

pemimpin juga hendaknya tetap menyadari bahwa kekuasaan tertinggi adalah al-Khalik (Allah SWT). Pemimpin harus cerdas, memiliki ilmu pengetahuan yang banyak bukan orang yang bodoh apalagi tidak waras. Bagi al-Ghazali “ilmu dan akal tetap merupakan nilai-nilai agama yang adi luhung dan jalan menuju Tuhan. Pemimpin harus adil, menurut al-Ghazali keadilan adalah pertemuan antara kepentingan-kepentingan agama dan duniawi. Pemimpin harus memiliki sifat-sifat yang baik, tidak zalim dan juga tidak takabur.

Pemerintahan Indonesia saat ini sedang mengalami krisis kepercayaan (distrust) sebagian masyarakat Indonesia. Analisa penulis berdasarkan teori al-Ghazali, adalah merupakan dampak dari rasa ketidakadilan

dan ketidakjujuran pemerintah yang dirasakan masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat dalam pemberlakuan hukum dan aktualisasi janji-janji surga yang dirasa jauh dari yang diharapkan. Sebagian masyarakat merasa dibohongi akibat politik pencitraan yang pernah dilakukan penguasa. Sebenarnya pro dan kontra dalam suatu kepemimpinan menurut penulis adalah wajar, bahkan kritik-kritik mereka yang kontra (oposisi) sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan kemajuan bangsa. Untuk itu sikap antipati terhadap oposisi yang berseberangan, sesungguhnya justru sangat merugikan pemerintahan yang sekarang sedang berlangsung di Indonesia.

Sepanjang perjalanan sejarah negara Indonesia dari masa pasca kemerdekaan hingga orde

reformasi, meninggalkan catatan-catatan yang cukup menarik untuk dikaji kembali. Masa orde lama, terjadi perubahan sistem pemerintahan dari Presidensial menjadi sistem pemerintahan Parlemeneter dan kembali lagi ke UUD 1945. Pergantian kabinet hingga tujuh kali menyebabkan masyarakat Indonesia pada saat itu hilang kepercayaan karena program-program kerja kabinet tidak dapat direalisasikan sebagaimana mestinya.

Masa orde baru, pemilihan Presiden pada masa itu terjadi tidak demokratis. Selain itu, terjadi penyimpangan seperti aspirasi masyarakat kurang didengar, maraknya korupsi, kolusi, nepotisme, dan bertambahnya kesenjangan sosial di tengah-tengah masyarakat. Pada masa orde baru ini Pegawai



UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Creative Economy Park

Negeri Sipil (PNS) ikut berpolitik, kemudian adanya Dwifungsi ABRI, yaitu ABRI memiliki kedudukan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan masa reformasi tahun 1998 terjadi perbaikan-perbaikan seperti mulai terjadi banyak pembenahan yaitu dibuatnya Undang-Undang yang mengatur tentang Anti Monopoli dan persaingan sehat, perubahan Undang-Undang Partai Politik dan yang paling penting adalah Undang-undang Otonomi Daerah yang mampu menahan gejolak disintegrasi yang telah diwarisi pada masa Orde Baru dan mulai banyak partai politik yang berkembang hingga dewasa ini. Semogal.